

## **TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

*Financial Report Transparency of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Langda Village,  
Buntu Batu District, Enrekang Regency*

**Arianti Astari<sup>1</sup>, Nurwani<sup>2</sup>, Muhammad Abdian Abdillah<sup>3</sup>, Fatimah<sup>4</sup>**

**Email:** [ariantiastari12@gmail.com](mailto:ariantiastari12@gmail.com)<sup>1</sup>, [whanynur@gmail.com](mailto:whanynur@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhammad\\_abdian@gmail.com](mailto:muhammad_abdian@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fatimahumpar11@gmail.com](mailto:fatimahumpar11@gmail.com)<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. Km. 6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kode  
Pos 91131

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus agar peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara mendalam sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan BUMDes Desa Langda masih tergolong rendah dan lebih bersifat internal serta administratif. Informasi keuangan belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat desa sehingga transparansi belum mencakup aspek partisipatif dan informatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, tidak adanya forum musyawarah terbuka, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum tersedianya regulasi maupun standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaporan keuangan. Untuk mewujudkan transparansi yang lebih baik, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi desa, peningkatan literasi keuangan pengurus BUMDes, pelatihan teknis pengelolaan keuangan, serta digitalisasi sistem pencatatan dan publikasi laporan keuangan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendorong terciptanya tata kelola BUMDes yang transparan, efektif, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** **Transparansi, Laporan Keuangan, BUMDes, Tata Kelola**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the transparency of financial reports of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Langda Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency, and to identify the factors influencing such transparency. The research employed a qualitative method with a case study approach, enabling the researcher to explore the phenomenon in depth within its real-life context. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis process consisted of several stages, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The findings reveal that the transparency of financial reporting in BUMDes Langda Village remains relatively low and tends to be internal and administrative in nature. Financial information has not been openly communicated to the village community; therefore, transparency has not yet reached participatory and informative dimensions. Several factors hinder the implementation of transparency, including limited human resource capacity in financial management, the absence of open deliberation forums, inadequate utilization of information technology, and the lack of regulations or standard operating procedures (SOPs) for financial reporting. To achieve ideal transparency, strategic measures are required, such as strengthening village regulations, improving the financial literacy of BUMDes administrators, providing technical training in financial management, and digitalizing the recording and publication systems of financial reports. In addition, active community participation plays an essential role in promoting transparent, effective, and accountable governance of BUMDes.*

**Keywords:** **Transparency, Financial Report, BUMDes, Governance**

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya [1]. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal [2]. Pelaporan merupakan aspek penting dalam pengelolaan BUMDes, karena laporan keuangan sektor publik berperan dalam menciptakan akuntabilitas. Penyampaian laporan keuangan sektor publik diharapkan dilakukan secara transparan agar dapat diakses oleh siapa saja, karena salah satu prinsip pendirian BUMDes adalah bersifat transparan atau terbuka dalam memberikan informasi mengenai pengelolaannya [1], [3]. Desa Langda yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi lokal. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa yang ada, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. BUMDes Desa Langda telah menjalankan beberapa unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengurus BUMDes [4]. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan dana, konflik internal, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terdahulu, literasi keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan baik [5].

Di BUMDes Desa Langda, transparansi pengelolaan laporan keuangan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari belum tersusunnya laporan keuangan secara lengkap, sehingga informasi mengenai penggunaan dana dan aktivitas usaha tidak dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain itu, laporan keuangan juga belum dipublikasikan melalui papan informasi desa, sehingga masyarakat mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait kondisi keuangan BUMDes. Dalam praktik pengelolaan, seluruh pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi atau sistem digital. Ketiadaan sistem tersebut berdampak pada terbatasnya keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menelaah laporan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi sebenarnya terbukti mampu meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan BUMDes [6]. Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, di mana masyarakat cenderung pasif dan jarang mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan keuangan BUMDes.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes juga berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman terhadap laporan keuangan dan tata kelola usaha, baik di kalangan pengurus maupun masyarakat umum. Kurangnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama mengapa pengelolaan BUMDes belum mencapai tingkat optimal [5]. Sebagai ilustrasi, di Desa Rosoan Kabupaten Enrekang, terbatasnya pemahaman pengelola terhadap aspek keuangan menyebabkan kesulitan dalam menyusun anggaran serta membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan secara tepat [5]. Situasi ini mengindikasikan bahwa tantangan serupa berpotensi terjadi di Desa Langda apabila peningkatan kapasitas pengelola tidak segera dilakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan langkah nyata seperti penyediaan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan, serta penyelenggaraan pelatihan bagi pengurus agar memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen dan akuntansi. Dengan mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkesinambungan.

Penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan pada BUMDes telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes [7], [8]. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola BUMDes yang baik [3]. Selain itu, literasi keuangan dan transparansi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki desa [5]. Namun, penelitian terdahulu umumnya lebih banyak berfokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum, serta belum secara spesifik

mengkaji kondisi implementasi transparansi laporan keuangan pada BUMDes di tingkat desa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menghubungkan transparansi pengelolaan laporan keuangan dengan faktor pendukung seperti penggunaan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes [9].

Di sisi lain, kondisi empiris di BUMDes Desa Langda menunjukkan adanya permasalahan berupa belum tersusunnya laporan keuangan secara lengkap, masih digunakannya sistem pencatatan manual, rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan BUMDes. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengelolaan BUMDes yang transparan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menganalisis transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes Desa Langda, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan tata kelola BUMDes yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang merupakan salah satu strategi penelitian untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata [10]. Pada penelitian ini dilakukan penelitian langsung untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian, hingga analisis data hasil penelitian, kurang lebih 2 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga Juli 2025. Teknik keabsahan data sebagai berikut:

- **Triangulasi**, digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data, yang mencakup triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat), triangulasi teknik (membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (mengumpulkan data pada waktu berbeda untuk melihat konsistensi informasi).
- **Member check**, dilakukan dengan mengembalikan hasil wawancara atau informasi yang telah diperoleh kepada informan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan maksud informan.
- **Perpanjangan pengamatan**, peneliti melakukan pengamatan secara lebih mendalam terhadap objek penelitian agar memperoleh data yang akurat serta membangun hubungan yang baik dengan informan.
- **Meningkatkan ketekunan pengamatan**, peneliti melakukan pengamatan secara cermat, berkesinambungan, dan teliti terhadap fenomena yang diteliti.
- **Penggunaan bahan referensi**, data hasil penelitian didukung dengan dokumen pendukung seperti laporan keuangan BUMDes, arsip, foto kegiatan, catatan lapangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes Desa Langda.

Dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber atau informan) memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan dipandang sebagai individu yang memiliki kedudukan penting karena memiliki pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, informan tidak hanya sekedar memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tetapi juga memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi, pandangan, pengalaman, serta pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan adalah individu yang memiliki peran, keterlibatan, pengetahuan, serta pengalaman terkait pengelolaan dan transparansi keuangan BUMDes Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mulai observasi, dimana observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik lain. Teknik ini digunakan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, serta situasi di mana jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak [10]. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Peneliti menggunakan teknik wawancara

terstruktur, di mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan, dengan tujuan menggali data tentang transparansi pengelolaan keuangan BUMDes secara lebih terbuka. Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis berupa dokumen atau catatan dari Desa Langda serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menguraikan, mengelola, dan menginterpretasikan data agar menjadi informasi yang bermanfaat [10]. Tahapannya meliputi reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan pada informasi penting dari data mentah, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti uraian, bagan, atau hubungan antarkategori; serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan diverifikasi berdasarkan data yang valid. Proses ini membantu peneliti memahami temuan secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan delapan informan, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Rincian jumlah informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Jenis Kelamin Informan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	5
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

Sumber: Data primer diolah, 2025

Desa Langda adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Langda memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang baik untuk dikembangkan, baik hasil pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Selain SDA yang baik, Desa Langda juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Adapun potensi mata pencaharian penduduk Desa Langda dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Potensi Mata Pencaharian Penduduk Desa Langda**

No	Jenis Mata Pencaharian
1	Petani
2	Pedagang
3	Buruh tani
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
5	Karyawan swasta
6	Tukang batu
7	Tukang kayu
8	Guru swasta
9	Sopir
10	Penjahit

Sumber: Data profil Desa Langda, 2025

Dilihat dari sosial budaya, penduduk Desa Langda 100% beragama Islam. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sementara yang lainnya sebagai pedagang, buruh tani, PNS, karyawan swasta, tukang batu, tukang kayu, guru swasta, sopir, dan penjahit. Di bidang pendidikan,

Desa Langda sudah berkembang dengan tersedianya lembaga pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD/MI, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

### **Tingkat Transparansi Laporan Keuangan BUMDes di Desa Langda**

Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda menunjukkan adanya upaya pencatatan dan pelaporan yang teratur, meskipun belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Dari segi kondisi keuangan, laporan keuangan masih belum tersusun secara menyeluruh dan lengkap. Hanya sebagian laporan keuangan yang telah dibuat, seperti catatan kas harian untuk pemasukan dari unit usaha dan pengeluaran operasional. Namun, belum ada penyusunan laporan keuangan yang mencakup komponen penting seperti buku besar dan arus kas. Hal ini menyulitkan dalam menilai kondisi keuangan BUMDes secara komprehensif dan akurat. Laporan keuangan BUMDes Desa Langda sebagian telah tersusun dan terdokumentasi dengan baik secara internal, tetapi keterbukaan kepada masyarakat masih rendah. Transparansi lebih banyak bersifat administratif dan vertikal ke pemerintah desa, belum menyentuh aspek horizontal atau partisipatif kepada publik. Tidak adanya forum terbuka, minimnya akses informasi, serta belum diterapkannya sistem digital menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas transparansi keuangan BUMDes di desa ini.

### **Faktor yang Memengaruhi Transparansi Laporan Keuangan BUMDes di Desa Langda**

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Langda masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan kultural. Rendahnya keterbukaan informasi disebabkan oleh lemahnya pemahaman pengurus serta minimnya tekanan dari warga. Transparansi idealnya merupakan interaksi dua arah antara pengelola dan masyarakat sebagai pemilik kepentingan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transparansi BUMDes di Desa Langda terkendala oleh lemahnya regulasi, terbatasnya kapasitas pengurus, kurangnya staf, minimnya partisipasi warga, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Diperlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi hambatan tersebut, melalui penyusunan regulasi desa, pelatihan teknis berkelanjutan, penyediaan sarana digital, serta penguatan kesadaran masyarakat untuk aktif mengawasi dan menuntut keterbukaan informasi agar tata kelola BUMDes menjadi lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **Pembahasan**

### **1. Tingkat Transparansi Laporan Keuangan BUMDes di Desa Langda**

Dalam konteks Desa Langda, meskipun telah dilakukan pencatatan keuangan secara manual sebagai bentuk tanggung jawab administratif, keterbukaan informasi masih bersifat internal dan belum menjangkau masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi publik yang inklusif [11].

Laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) ataupun pedoman akuntansi desa [12]. Walaupun sudah terdapat sebagian komponen laporan, penyusunannya masih sederhana dan belum mengacu secara konsisten pada standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan kelengkapan, sehingga menyulitkan ketika digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja secara menyeluruh [16].

Secara empiris, bentuk transparansi di BUMDes Desa Langda tampak melalui praktik pencatatan kas harian dan tahunan serta penyampaian laporan pada forum Musyawarah Desa setiap akhir tahun. Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan administratif di lingkup internal pengelola. Namun, keterbukaan tersebut belum bertransformasi menjadi transparansi publik yang proaktif; akses informasi masih bergantung pada permintaan warga dan penjelasan lisan dari pengurus, sehingga keterbukaan cenderung bersifat reaktif dan tidak menjangkau masyarakat luas secara periodik. Jika dirujuk pada indikator transparansi (informatif, keterbukaan, dan pengungkapan), praktik yang ada baru memenuhi aspek administratif dasar [13]. Sementara itu, bentuk transparansi yang ideal seperti publikasi ringkasan laporan berkala (bulanan/triwulanan), pemasangan papan informasi desa, penyediaan akses dokumen dan bukti transaksi yang relevan, serta kanal digital sederhana belum berjalan konsisten. Akibatnya, informasi mengenai posisi kas, arus kas, dan kinerja unit usaha belum dapat dipantau warga secara mudah dan berkesinambungan, sehingga fungsi kontrol sosial dan akuntabilitas publik belum optimal.

Aspek pengawasan eksternal sesekali dilakukan melalui audit Inspektorat Kabupaten. Audit ini berfokus pada kesesuaian dokumen belanja dan pemasukan. Walaupun tidak dilakukan secara berkala, kehadiran audit memberi dorongan terhadap akuntabilitas BUMDes dan menegaskan pentingnya pencatatan keuangan yang konsisten [13], [15].

Ketiadaan publikasi terbuka terhadap laporan keuangan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi horizontal, yaitu keterbukaan kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah dari BUMDes [8]. Ketergantungan pada penyampaian informasi berdasarkan permintaan individu menunjukkan bahwa pengelolaan informasi masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa yang idealnya dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi atas jalannya pengelolaan keuangan desa.

Kondisi Desa Langda ini sejalan dengan temuan penelitian di Kecamatan Langowan Barat, di mana laporan keuangan BUMDes juga hanya disampaikan kepada otoritas desa tanpa publikasi luas [3]. Demikian pula, penelitian mengenai rendahnya literasi keuangan pengurus BUMDes relevan, karena keterbatasan SDM menjadi faktor utama lemahnya transparansi di Desa Langda [5]. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah serupa banyak dialami oleh BUMDes di berbagai wilayah.

## 2. Faktor yang Memengaruhi Transparansi Laporan Keuangan BUMDes di Desa Langda

Salah satu faktor utama yang menjadi penghalang transparansi adalah rendahnya pemahaman pengelola mengenai arti penting keterbukaan. Laporan keuangan masih dipandang sebagai dokumen internal, bukan instrumen publik untuk memastikan akuntabilitas [7]. Hal ini menyebabkan penyampaian laporan hanya dilakukan sebatas memenuhi kewajiban administratif, bukan untuk memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat.

Transparansi laporan keuangan BUMDes tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural dan kultural yang membentuk pola pengelolaan di tingkat desa. Di Desa Langda, transparansi belum terbangun secara sistemik karena belum ada budaya organisasi yang menempatkan keterbukaan sebagai nilai utama dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari kecenderungan pengurus untuk menjadikan laporan keuangan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai alat pertanggungjawaban publik. Budaya birokrasi yang masih tertutup turut memperlemah semangat akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama [17].

Rendahnya literasi keuangan di kalangan pengurus juga memperlemah kualitas transparansi [5]. Keterbatasan pemahaman terkait pencatatan dan penyusunan laporan sesuai standar akuntansi membuat dokumen keuangan cenderung sederhana dan tidak lengkap. Akibatnya, masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sulit memahami kondisi keuangan BUMDes secara menyeluruh.

Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah tingkat partisipasi masyarakat. Minimnya keterlibatan warga dalam mengawasi pengelolaan BUMDes membuat praktik keterbukaan tidak berkembang dengan baik [14]. Ketika masyarakat tidak menunjukkan kepedulian, pengurus pun tidak merasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara sistematis dan terbuka. Faktor berikutnya adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan laporan keuangan. Tanpa pedoman yang baku, pencatatan dan pelaporan dilakukan secara konvensional dan tidak konsisten. SOP seharusnya menjadi dasar untuk memastikan laporan disusun secara seragam, teratur, dan mudah dipahami.

Keterbatasan teknologi juga berperan besar dalam melemahkan praktik transparansi. Seluruh pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual di buku kas. Tanpa perangkat digital, proses administrasi berjalan lebih lambat, rawan kesalahan, serta menyulitkan dokumentasi jangka panjang, sekaligus mengurangi peluang publikasi laporan melalui media daring [6]. Faktor teknologi informasi memainkan peran sentral dalam mendukung praktik transparansi keuangan di era digital, namun BUMDes Desa Langda masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarkan laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu di Kabupaten Enrekang juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan pengelola serta minimnya pelatihan menjadi penyebab rendahnya transparansi dan akuntabilitas BUMDes [5]. Penelitian tersebut merekomendasikan adanya pelatihan teknis, sistem pencatatan yang tertib, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Rekomendasi tersebut sejalan dengan kebutuhan yang tampak jelas dalam konteks Desa Langda, di mana upaya kolaboratif dan sistematis sangat dibutuhkan untuk mendorong praktik tata kelola yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih bersifat internal, administratif, dan vertikal, serta belum menyentuh dimensi partisipatif dan informatif kepada masyarakat. Keterbatasan kapasitas SDM, tidak adanya forum diskusi publik, belum diterapkannya media digital, dan pasifnya keterbukaan informasi menjadi faktor-faktor utama yang menghambat tercapainya transparansi yang ideal. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya pemahaman pengurus, ketiadaan regulasi dan SOP, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, upaya pembenahan perlu difokuskan pada peningkatan literasi keuangan, pelaporan berkala, digitalisasi sistem informasi, serta penguatan regulasi publikasi keuangan yang inklusif.

### Saran

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes, diperlukan pelatihan teknis berkelanjutan bagi pengurus terkait pembukuan dan pelaporan keuangan yang praktis dan sesuai dengan konteks desa. Pemerintah desa bersama BUMDes juga perlu menetapkan Peraturan Desa (Perdes) dan SOP yang mengatur kewajiban pelaporan keuangan secara terbuka dan berkala. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan melalui aplikasi sederhana, website, atau media sosial resmi perlu segera diterapkan guna meningkatkan aksesibilitas dan akurasi data. Partisipasi masyarakat juga penting melalui forum diskusi publik atau musyawarah desa rutin untuk mendorong pengawasan, evaluasi, serta pemberian masukan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arnis, M. (2018). *Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat ekonomi pedesaan di Desa Pantan Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository-ar-raniry.ac.id/id/eprint/6356/>
- [2] Suryanto, R. (2018). *Peta jalan BUMDes sukses*. PT Syncore Indonesia.
- [3] Kalangie, R. J., Sampe, S., & Kawung, N. (2023). Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 3(2), 12–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/5250>
- [4] Fajaruddin, F. (2021). Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, 1(1), 662–671. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/SEMNASTERA/article/view/4544>
- [5] Rahmatullah, Tarawiru, Y., & Harun, H. H. (2024). The financial literacy level of BUMDes managers in business development at Desa Rosoan Kabupaten Enrekang. [*Nama Jurnal*], 4, 514–527.
- [6] Dewi, K. C., & Kurniawan, P. S. (2018). Analisis efektivitas sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi pada BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.13167>
- [7] Akbar, A. M., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716–725. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>
- [8] Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- [9] Mudhofar, M. (2022). Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>

- [10] Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [11] Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA*, 1(1), 20–34. <https://jurnal.unipa.ac.id/index.php/akun/article/view/258>
- [12] Rohmah, N. S. (2023). Analisis transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa (Studi kasus BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto). *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(1), 681–690. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/19453>
- [13] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- [14] Fitriana, N. (2021). *Transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) dalam perspektif good corporate governance* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/13710/>
- [15] Halim, A. (2017). *Sistem akuntansi sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- [16] Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis laporan keuangan*. UPP STIM YKPN.
- [17] Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72.